

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 DI KAB. PURWOREJO**



SKRIPSI

oleh :

Nama :Ratih Raka Siwi

NIM : 08312339

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYUSUNAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. PURWOREJO**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

oleh :

Nama :Ratih Raka Siwi

NIM : 08312339

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 DI KAB. PURWOREJO**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

oleh :

Nama :Ratih Raka Siwi

NIM : 08312339

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2011

Penyusun

(Ratih Raka Siwi)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006 DI KAB. PURWOREJO**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh:

Nama : Ratih Raka Siwi

NIM : 08312339

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing,

Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmad, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Kab. Purworejo”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, kesehatan, dan segala kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.H. Edi Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Noor Endah Cahyawati, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi. Atas segala bantuan dan pelajaran yang diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ibu dengan limpahan karunia-Nya.
5. Ayahanda Drs. Heru Susmanto dan Mama Dra. Yuniati, atas segala dukungan dan kasih sayang selama ini baik moril maupun materiil. Words never able to describe how much i love you both.

6. My Little Brother Sanjaya Ancas Mahardika, thank you for every single thing we share. It might be something's simple, but always meaningful for me.
7. Wahyu Nugroho Dwi Kuncoro Aji, for the priceless experience, the value of life. For every single smile and tear. Let's start, be us against the world.
8. Bapak dan Ibu Kaligesing, terima kasih atas support dan kasih sayang yang telah diberikan.
9. Jajaran Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Perijinan Terpadu, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Kasubag DP2KAD.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 sejak Kelas OCB. Nila, Erma, Devi, Ridwan, Adit, Ejak, Windi, Nohan, Yan, Ayak, dll. Amazing story with you guys.
11. Teman-teman KKN UII Unit 75. Icha, Enggar, Nurul, Candra, Said, Wiebhi, Dhimas. Atas pengalaman berharga dan kerjasamanya selama menempuh KKN.
12. Kakak-kakak yang baik tempat berbagi cerita, Mba Tya, Mba Vira, Mba Vera, Mba Ayie. Thank you for the sisterhood story, Stay in touch.
13. Keluarga besar trah Sarmin Prawiro dan trah Kasmin Hadi. Homey Family!
14. The last but not least, teman seperjuangan sependadaran saling menguatkan, Shari dan Weni. May God always bless our way. Me love you guys.

15. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini kelak dapat berguna bagi semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2011

Penyusun

(Ratih Raka Siwi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bingkisan kecil ini Penulis persembahkan kepada :

Bapak, Drs. Heru Susmanto

Dan Mama, Dra. Yuniati

This is the only thing I can give to thank everything that you gave to me...

I wish you happy and proud☺

MOTTO

“We face our real world, with our own quotes.”

~ WNDKA, 2010

“Live your life to the fullest.”

~ unknown

“If you keep living in what people thinking, you might be coming from the B.C. year.”

~ Ratih Raka Siwi, 2011

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Persembahan	viii
Motto	ix
Daftar Isi	x
Daftar Grafik dan Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
 BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	 10
2.1. Landasan Teori	10
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
2.3. Pengembangan Hipotesis	20
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 28
3.1. Populasi dan Sampel	28
3.2. Metode Pengumpulan Data	29

3.3.	Pengukuran Variabel	29
3.4.	Uji Kualitas Data	31
3.4.1.	Uji Validitas	31
3.4.2.	Uji Reliabilitas	32
3.5.	Teknik Analisis Data	32
3.6.	Uji Hipotesis	33
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		37
4.1.	Hasil Pengumpulan Data	37
4.2.	Deskripsi Responden	38
4.3.	Uji Validitas dan Reliabilitas	41
4.4.	Menilai Inner Model	44
4.5.	Hasil Pengujian Hipotesis	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		57
5.1.	Kesimpulan	57
5.2.	Keterbatasan Penelitian	58
5.3.	Saran	59
Referensi		60

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

	Hal
Grafik 4.1. Hasil Pengumpulan Data	38
Grafik 4.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	39
Grafik 4.3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Grafik 4.4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	41
Tabel 4.1. AVE dan Akar AVE	42
Tabel 4.2. Correlations of The Latent Variables	42
Tabel 4.3. Composite Reliability	44
Tabel 4.4. Result For Inner Weight	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1. Rerangka Konseptual	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner
2. Hasil Olah Data

ABSTRACT

This study examines empirically the impact of the antecedent factors on the use of regulation of the budget systems and managerial performance by local government. According the work of reasoned-action theory, theoretical framework is designed to enable an assessment of the antecedent factors on the use of regulation of the budget systems and managerial performance.

The study is based on data collected from managers and employees involved in establishing budget in each of sub-unit in local government, namely Purworejo. In apart of the results support the hypotheses and demonstrate the consequences of the antecedent factors power on use of regulation of the budget systems and managerial performance by local government.

Key Words : Managerial performance, Use of regulation of the budget systems, Ease of use, Usefulness, Anxieties, Attitude, and Organizational behavior.

ABSTRAK

Penelitian ini menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan teori tindakan logis, landasan teori dibentuk untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian dilakukan berdasarkan data yang diambil dari kepala bagian dan staff yang menyusun dan mengelola keuangan daerah pada setiap SKPD di Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci : Kinerja Manajerial, Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemudahan Penggunaan, Kegunaan, Kebingungan, Sikap, Perilaku Organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi telah membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Satu diantara agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah (Warisno, 2009). Berdasarkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD

merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai instrument untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2007 dapat dicapai paling lambat satu bulan sebelum APBD dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Nurlaela dan Rahmawati (2009), Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan *good government* dan *clean government* (Nurlaela dan Rahmawati, 2009).

Isu sentral dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa dan bagaimana yang berpengaruh terhadap proses implementasi (kesuksesan) Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Argumentasi yang mendukung penetapan isu-isu sentral ini adalah bahwa proses sentralisasi menjadi desentralisasi dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia sangat bergantung pada perubahan perilaku orang yang terlibat dalam proses tersebut, khususnya yang mengimplementasikan perubahan paradigma Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan paradigma ini, mengharuskan adanya perubahan cara berpikir, berkeyakinan, dan bertindak menyangkut proses implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menyangkut kegiatan pelayanan publik secara umum (Haryani dan Syafruddin, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2008), tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, komitmen, SDM, bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) tentang analisis Implikasi Ketidakesesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKPD), hasil

menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan yang berlaku yaitu PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan struktur organisasi baru yang sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Syafruddin (2009), tentang Kepercayaan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Batang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebingungan dan faktor kemudahan para aparat pemerintah tidak berperan dalam meningkatkan penggunaan dan kinerja secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela dan Rahmawati (2009) tentang Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi (keberhasilan) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Purworejo karena Penulis melihat adanya kecenderungan aparat pemerintah daerah Kabupaten Purworejo membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding daerah-daerah lain dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Menurut hasil survey yang dilakukan, aparat

pemerintah daerah Kabupaten Purworejo memerlukan waktu 2 – 3 tahun untuk mengimplementasikan Permendagri No. 13 Tahun 2006 secara keseluruhan. Sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhar (2008) serta Haryani dan Syafruddin (2009), Kota Banda Aceh dan Batang hanya memerlukan waktu 1 – 2 tahun saja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahkannya variabel perilaku organisasi sebagai variabel independent. Selain itu, populasi penelitian ini tidak hanya pegawai negeri sipil yang bekerja di bagian keuangan kantor sekretaris daerah dan badan pengelolaan keuangan daerah, namun juga pengelola keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Penatausahaan Dinas Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka judul dari penelitian ini adalah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Kabupaten Purworejo”.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah?
2. Apakah faktor sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap

tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah?

3. Apakah faktor tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah?

4. Apakah faktor tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah?

5. Apakah faktor Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah?

6. Apakah faktor perilaku organisasi terhadap aturan Penyusunan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah mengukur bukti empiris bahwa:

1. Faktor Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
2. Faktor sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
3. Faktor tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
4. Faktor tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah?
5. Faktor Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.
6. Faktor perilaku organisasi terhadap aturan Penyusunan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam implementasi peraturan perundang-undangan.
3. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian, dan perumusan hipotesa.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data dan analisis data, variabel penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis data beserta pembahasannya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kepercayaan (Teori Tindakan Logis)

Model konseptual dasar yang dirumuskan dan digunakan dalam penelitian ini dikembangkan atas teori tindakan logis (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Haryani dan Syafruddin (2009). Menurut Haryani dan Syafruddin (2009) teori tersebut memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavioural intentions*). Keinginan berperilaku seseorang itu sendiri ditentukan oleh sikap orang tersebut terhadap perilaku dan juga ditentukan seperangkat norma-norma subjektif tentang perilaku yang dimaksud. Sikap seseorang terhadap perilaku spesifik merupakan fungsi kepercayaan (*beliefs*) dan evaluasi, dan bahwa norma-norma subjektif seseorang merupakan fungsi kepercayaan normatif dan motivasi untuk memenuhi norma-norma tersebut.

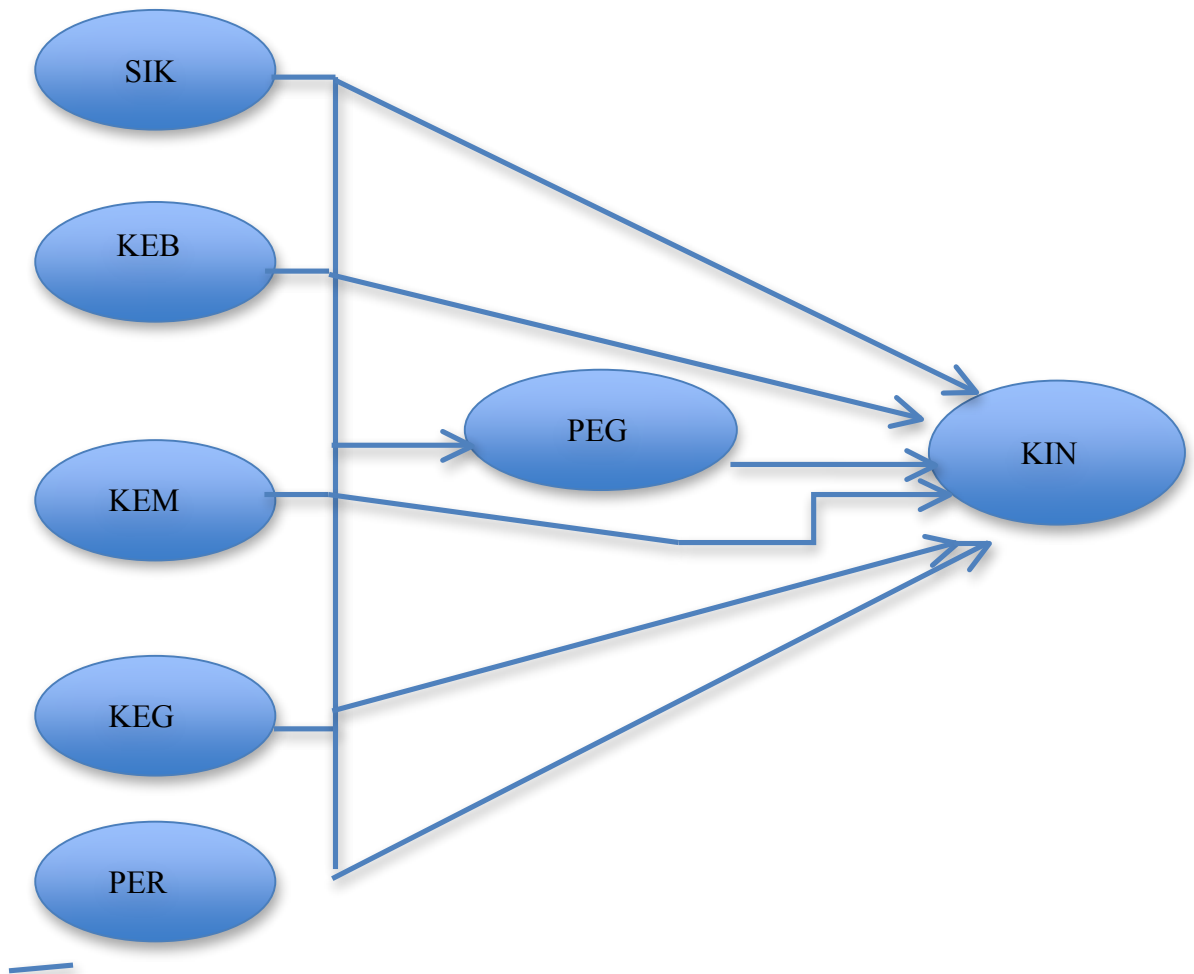
Pengembangan penelitian ini juga didasari oleh Teori Inferensi Korespondensi yang dikembangkan oleh Jones dan Davis (1965) dalam Sarwono (2010; 177). Teori tersebut memodelkan konsep Tindakan dan Efek (*Act and Effect*) dan mendefinisikan tindakan sebagai keseluruhan respons yang mencerminkan pilihan si pelaku yang akan menimbulkan akibat (efek) terhadap lingkungannya. Efek itu bisa satu macam, bisa juga beberapa macam sekaligus.

Sedangkan pilihan bisa antara bertindak maupun tidak bertindak dan bisa juga beberapa macam tindakan (Sarwono, 2010; 179).

Model teori tindakan logis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Haryani dan Syafruddin (2009) serta Jones dan Davis (1965) dalam Sarwono (2010) diatas merupakan model teori yang menjadi dasar untuk mengembangkan dan merumuskan model penelitian bagi penelitian ini. Secara lebih rinci, model penelitian ini selanjutnya merupakan model penelitian teoritis yang menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemerintah daerah menerima seperangkat peraturan otonomi daerah yang demikian luas, kompleks, dan membutuhkan kemampuan dan keahlian teknis tertentu untuk memahami dan menerapkan dalam praktek kerja mereka sehari-hari.

Gambar 2.1. berikut merefleksikan model penelitian yang menunjukkan hubungan atau pengaruh sebab akibat antara berbagai variabel atau berbagai faktor yang diteliti. Dalam gambar tersebut dinyatakan bahwa dalam implementasi otonomi daerah, hasil kerja (kinerja pekerjaan) aparat pemerintah daerah dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kegunaan berbagai aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui jalur variabel yang terdiri dari (a) Sikap aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan atau penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam praktek kerja mereka; (b) Tingkat kemudahan penggunaan atau penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (c) Tingkat Kebingungan yang dialami oleh aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan atau penerapan

aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (d) Tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri dalam praktik kerja mereka.

GAMBAR 2.1. RERANGKA KONSEPTUAL

Sumber : Teori Tindakan Rasional (Fishbein dan Ajzen, 1975) yang dikembangkan.

Keterangan:

SIK = Sikap terhadap aturan

KEM = Kemudahan penggunaan aturan

KEB = Kebingungan terhadap aturan

KEG = Kegunaan aturan

PEG = Penggunaan aturan

PER = Perilaku organisasi thd aturan

KIN = Kinerja pekerjaan

2.1.2. Faktor Perilaku Organisasi

Faktor organisasi dalam implementasi aturan meliputi kejelasan tujuan dan pelatihan. Faktor tersebut didefinisikan oleh Chenhall (2004) dalam Nurlaela dan Rahmawati (2009) sebagai berikut: Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan penggunaan atau penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai aturan tersebut.

Boston et al (1996) dalam Sarwono (2010; 192) mengidentifikasi *Public Choice theory* sebagai paradigma yang dominan ketika siap untuk mereformasi pemerintah. *Public Choice Theory* menganggap semua tingkah laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi. Menurut Graham (2005; 98), *Contingency Theory* yang dipelopori oleh Burn dan Stalker (1980), mengidentifikasi tipe struktur dan praktek manajemen yang tepat untuk berbagai kondisilingkungan yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa organisasi yang mekanistik (dengan ciri-ciri pembagian tugas yang spesifik dan tegas) tepat untuk lingkungan yang stabil, sedangkan organisasi yang dinamis (dengan ciri-ciri struktur yang fleksibel) tepat untuk lingkungan tidak stabil. Berdasarkan pada *Contingency Theory*, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tergantung pada kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.1.3. Kinerja Pekerjaan

Menurut Marsdiasmo (2004) dalam Warisno (2009) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Disamping itu pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/biro/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD.

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Menurut Stoner (1986) dalam Arnia (2001) dalam Warisno (2009) kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Menurut Robbins (1997 : 231) dalam Maryanti (2005), Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu fungsi kerja atau aktivitas selama periode tertentu, hal senada juga diungkapkan oleh Prawirosentono (1999) dalam Warisno (2009), yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Sedangkan menurut Warisno (2009), Kinerja Manajerial (*Managerial Performance*) merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial seperti : perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan wujud dari

vertical accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Permendagri No.13 tahun 2006 dikatakan sebagai pengguna anggaran melakukan tugas antara lain dari proses penyusunan APBD, Pelaksanaan dan penatausahaan belanja, pelaksanaan dan penataan pendapatan, akuntansi dan pelaporan sampai kepada perubahan APBD.

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 PP 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 pasal (4) dan (5), mengamanatkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Edward (1992) dalam Warisno (2009) menyatakan manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan

secara jelas tujuan dari manajemen keuangan. Hal ini menandakan bahwa bila pemerintah daerah secara jelas dapat mendefinisikan atau merumuskan tujuan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan tentang alokasi sumber daya daerah untuk kepentingan publik dapat tercapai.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kab. Maluku Tengah di Provinsi Maluku)”, dengan variabel independen adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen adalah kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah, artinya bila pengelolaan keuangan daerah dikelola sesuai mekanisme yang berlaku dan didukung oleh peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah maka dapat mendorong kinerja masing-masing satuan kerja pemerintah daerah.

Haykal (2007) telah menganalisis “Peran dan fungsi SKPD dalam Pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja (Studi kasus pada Pemkab Aceh Timur)”. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dengan variabel independen adalah perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran, sedangkan variabel

dependen adalah kinerja SKPD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengujian secara simultan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD pada Pemkab Aceh Timur, sedangkan pengujian secara parsial dapat diketahui hanya variabel penyusunan anggaran yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD.

Azhar (2008) telah meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri 13 tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan variabel independen adalah komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung serta regulasi, sedangkan variabel dependen adalah keberhasilan penerapan Permendagri 13 tahun 2006. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan Komitmen, Sumber daya manusia, perangkat pendukung dan Regulasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006. Sementara Secara parsial Regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) tentang analisis Implikasi Ketidakesesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan yang berlaku yaitu PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan struktur organisasi baru yang

sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2006 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Syafruddin (2009), tentang Kepercayaan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Batang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebingungan dan faktor kemudahan para aparat pemerintah tidak berperan dalam meningkatkan penggunaan dan kinerja secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela dan Rahmawati (2009) tentang Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Warisno (2009) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jambi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas SDM, Komunikasi, Sarana pendukung dan Komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Hubungan Tingkat Penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Pekerjaan.

Segala hal yang menambah perasaan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan seseorang ketika sedang bekerja akan semakin meningkatkan kepuasan dan kinerja orang tersebut. Tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu hal yang bisa meningkatkan perasaan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan seseorang. Ini terjadi, karena penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian teknis seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi aparat pemda dalam menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, semakin tinggi pula kinerja pekerjaan orang tersebut. Dalam hal ini tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sebagai jumlah waktu yang digunakan dalam proses penyusunan APBD.

H1 : Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

2.3.2. Hubungan Sikap terhadap Aturan dan Kinerja Pekerjaan

Dalam penelitian ini, sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai perasaan umum aparat pemda untuk lebih menyukai atau lebih tidak menyukai terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka,

hususnya dalam penyusunan APBD). Dalam penelitian ini diprediksi bahwa sikap aparat pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara positif akan meningkatkan kinerja pekerjaan aparat pemda tersebut.

H2 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

2.3.3. Hubungan Sikap Terhadap Aturan dan Penggunaan Aturan

Penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara sikap dan perilaku pemakai atau pengguna sesuatu adalah Lucas(1975), Schewe(1976), Robey(1979), Ginzberg(1981), dan Ives et al(1983) dalam Haryani dan Syafruddin (2009). Penelitian mereka menunjukkan dan menyimpulkan bahwa hubungan antara kedua faktor adalah kuat dan signifikan. Oleh karena itu maka penelitian ini memprediksi sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan dan optimisme aparat pemda dalam menggunakan dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

H3 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.4. Hubungan Kebingungan Terhadap Aturan dan Kinerja Pekerjaan dan Penggunaan Aturan

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menjelaskan kebingungan seseorang dalam konteks khusus, yaitu kebingungan aparat pemda dalam mempersepsikan, memahami, dan menerapkan/menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebingungan aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang mengalami tingkat ketidak-mudahan terhadap penggunaan aturan otonomi daerah atau pemikiran mereka tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari situasi semacam ini dapat diprediksi bahwa semakin tinggi tingkat kebingungan aparat pmda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka semakin tinggi pula sikap daya tolak aparat pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat diartikan sebagai tingkat ketakutan yang tidak realistik dan keprihatinannya. Intensitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan meningkat dalam rangka merespon rangsangan khusus (dalam penelitian ini adalah keberadaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Kegunaan (secara esensial adalah kepercayaan terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan kepercayaan yang cukup kuat sebagai bagian dari individu untuk membujuk atau mendorong bahwa orang tersebut akan tetap atau tidak

menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar argumentasi atau definisi ini, maka dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami, dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD (Haryani dan Syafruddin, 2009).

H4 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

H5 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.5. Hubungan Kemudahan Penggunaan Aturan dan Penggunaan Aturan

Erat hubungannya dengan uraian yang ada di atas, penelitian juga memprediksi bahwa tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan menghasilkan tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga semakin tinggi. Sesuai dengan penelitian Bandura (1982) dalam Haryani dan Syafruddin (2009), kemanjuran atau kemujaraban diri sendiri (self-efficacy) adalah judgement atau perkiraan seseorang bagaimana orang tersebut dapat dengan mengeksekusi atau menjalankan tindakan tertentu yang dibutuhkan atau sesuai dengan situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini adalah perkiraan aparat pemda dalam

mengekskusi atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar uraian ini dapat diprediksi bahwa kemudahan penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

H6 : Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan /penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.6. Kemudahan Penggunaan Aturan dan Kinerja

Konsisten dengan uraian yang ada pada hipotesis 6 di atas, maka dapat diprediksi bahwa kemudahan tentang penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap positif aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu juga dapat diantisipasi dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami, dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD.

H7 :Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

2.3.7. Hubungan Kegunaan Aturan dan Penggunaan Aturan

Menurut Haryani dan Syafruddin (2009) Kegunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sesuatu tersebut maka orang ini akan merasa meningkatkan kebebasannya dalam berusaha atau bekerja. Sedang penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut. Dalam konteks aparat pemda, aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan atau berpengaruh secara positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

H8 : Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

2.3.8. Hubungan Kegunaan Aturan dan Kinerja

Untuk memperkirakan apakah aparat pemda akan menggunakan atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, juga tergantung pada apakah aparat pemda tampaknya mempunyai sikap positif terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau tidak. Jika aparat pemda berpegang pada sikap positif bahwa aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang berguna dan dengan mudah diterapkan, maka dapat diperkirakan bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkatkan sikap positif aparat pemda tersebut.

H9 : Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat daerah.

2.3.9. Hubungan Perilaku Organisasi Pada Kinerja dan Penggunaan Aturan

Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada 2 aspek, meliputi kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut : Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan diterapkannya aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai aturan tersebut (Chenhall, 2004 dalam Nurlaela dan Rahmawati, 2009).

Pada konteks kinerja pekerjaan dan penggunaan aturan, diasumsikan bahwa aparat pemda yang memiliki perilaku organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyusun dan mengelola keuangan daerah menjadi relatif lebih tepat dan baik.

H10 : Perilaku organisasi berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

H11 : Perilaku organisasi berpengaruh positif pada penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Menurut Neuman (2006: 227) populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, yaitu keseluruhan elemen yang memiliki satu atau lebih atribut kepentingan. Menurut Sugiyono (1997) dalam Warisno (2009) Populasi adalah wilayah generalisasi, yang terdiri dari obyek atau sesuatu subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda alam lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah Kabupaten Purworejo.

Sedangkan menurut Neuman (2006: 232) sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Metode sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Adapun sampel dari penelitian ini adalah staf-staf dari dinas dan kantor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Peneliti mengirim sebanyak 130 kuesioner yang disebarakan kepada responden. Responden bukan hanya pegawai negeri sipil yang bekerja di bagian keuangan kantor sekretaris daerah dan badan pengelolaan

keuangan daerah, namun juga pengelola keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Penatausahaan Dinas Kabupaten Purworejo. Pemilihan staf-staf SKPD sebagai populasi karena instansi tersebut adalah satuan kerja pemerintah yang turut menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah (Warisno, 2009).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survey. Data primer yaitu didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara ataupun hasil pengisian kuesioner. Data primer memerlukan pengolahan lebih lanjut. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui pembagian kuesioner kepada staf-staf dari dinas dan kantor pada pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan secara berstruktur yang mana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif tertentu saja.

3.3. Pengukuran Variabel

3.3.1. Kemudahan Penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Diukur dengan menggunakan 4 item pertanyaan dengan menggunakan 6 poin Skala Likert. Skala pengukuran ini diadopsi dari item-item yang

dikembangkan, diuji, dan digunakan dalam penelitian oleh Davis, 1989 dalam Haryani dan Syafruddin, 2009.

3.3.2. Kegunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Diukur atas dasar 6 item pertanyaan dengan menggunakan 6 poin Skala Likert yang juga dikembangkan oleh Davis, 1989 dalam Haryani dan Syafruddin, 2009.

3.3.3. Kebingungan Aparat Pemda dalam memahami dan mengaplikasikan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Diukur atas dasar ukuran atau skala yang dikembangkan dan digunakan oleh penelitian Howard, 1986 dalam Haryani dan Syafruddin, 2009. Pengembangan dan penggunaan alat ukur penelitian terhadap variabel ini adalah 4 item pertanyaan dengan 6 poin Skala Likert.

3.3.4. Sikap Aparat Pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Diukur berdasar metode dan instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Hatcher dan Diebert (1987) dalam Haryani dan Syafruddin (2009), penelitian ini menggunakan 4 item pertanyaan dengan 6 poin skala Likert.

3.3.5. Tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mengukur tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Haryani dan Syafruddin (2009) dengan mengajukan pertanyaan tentang berapa tahun atau berapa bulan aparat Pemda mengetahui dan mengaplikasikan aturan tersebut dalam pekerjaan mereka.

3.3.6. Kinerja Pekerjaan

Diukur atas dasar cara yang dikembangkan dan digunakan oleh Bownell dan Dunk, 1991 dalam haryani dan Syafruddin, 2009. Atas dasar penelitian yang dilakukan Bowell dan Dunk ini, instrumen jumlah item pertanyaan adalah 6 item yang juga dengan 6 poin skala Likert.

3.3.7. Perilaku Organisasi

Diukur dengan menggunakan 11 item pertanyaan yang dibangun oleh Shield dan Young (1989) dan Shield (1995) yang dimodifikasi oleh Nurlaela dan Rahmawati (2009), dengan 6 poin Skala Likert.

3.4. Uji Kualitas Data

3.4.1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur diyakini dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur item-item pertanyaan/pernyataan kuesioner dalam penelitian.

Menurut Jogiyanto (2011) Validitas Konvergen suatu konstruk dapat dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika *original sample estimate* pada *outer loading* berkorelasi lebih dari 0,50. Apabila menggunakan validitas diskriminan, atau akar AVE konstruk harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antarvariabel laten tersebut (Jogiyanto, 2011).

3.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi antara hasil pengamatan dengan instrumen atau alat ukur yang digunakan pada waktu yang berbeda-beda.

Menurut Jogiyanto (2011) Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability*. Untuk dapat dikatakan reliable, maka nilai *cronbach's alpha* suatu konstruk harus $>0,6$ dan tingkat reliabilitas suatu konstruk yang dapat diterima secara umum adalah nilai *Construct Reliability* $>0,7$.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah model persamaan struktural (Structural Equation Modelling, selanjutnya disingkat dengan SEM). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS. Analisis data dengan SEM dipilih karena analisis statistik ini merupakan teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis faktor untuk mengestimasi serangkaian hubungan saling ketergantungan secara simultan (Jogiyanto, 2011)

3.6. Uji Hipotesis

Terdapat beberapa hipotesis dalam penelitian ini, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, digunakan alat uji yaitu Uji Parsial atau t-test.

Untuk membuktikan uji kebenaran hipotesis digunakan t-test atau uji t yaitu dengan menguji koefisien regresi linier berganda secara sendiri-sendiri sehingga dapat diketahui variabel bebas bersama-sama berpengaruh secara signifikan.

Berikut ini persamaan-persamaan yang merefleksikan pengujian hipotesis yang ditunjukkan untuk menguji hubungan sikap, kemudahan, kebingungan, kegunaan, perilaku organisasi, tingkat penggunaan, dan kinerja. Model penelitian ini memprediksi bahwa variable independen memiliki pengaruh pada variable dependen, hal ini dijelaskan pada model analisis regresi berikut ini :

$$KIN = \alpha_1 + \beta_1 PEG + \beta_2 SIK + \beta_4 KEB + \beta_7 KEM + \beta_9 KEG + \beta_{10} PER + \varepsilon_1$$

$$PEG = \alpha_2 + \beta_3 SIK + \beta_5 KEB + \beta_6 KEM + \beta_8 KEG + \beta_{11} PER + \varepsilon_2$$

Keterangan :

KIN : Kinerja Pekerjaan

PEG : Tingkat Penggunaan Peraturan

SIK : Sikap Aparat Pemerintah Daerah

KEB : Kebingungan Terhadap Peraturan

KEM : Kemudahan Peraturan

KEG : Kegunaan Peraturan

PER : Perilaku Organisasi

Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (HA):

Ho1 : Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

HA1 : Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Ho2 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

HA2 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Ho3 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

HA3 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ho4 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

HA4 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Ho5 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan tidak berpengaruh negatif terhadap penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

HA5 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ho6 : Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif pada tingkat penggunaan /penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

HA6 : Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan /penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ho7 :Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

HA7 :Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Ho8 : Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

HA8 : Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

Ho9 : Tingkat kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif pada kinerja aparat daerah.

HA9 : Tingkat kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja aparat daerah.

Ho10 : Perilaku organisasi tidak berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

HA10 : Perilaku organisasi berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Ho11 : Perilaku organisasi tidak berpengaruh positif pada penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

HA11 : Perilaku organisasi berpengaruh positif pada penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

HA didukung apabila signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan nilai original sample estimate tidak berubah arah. (Jogiyanto, 2011).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

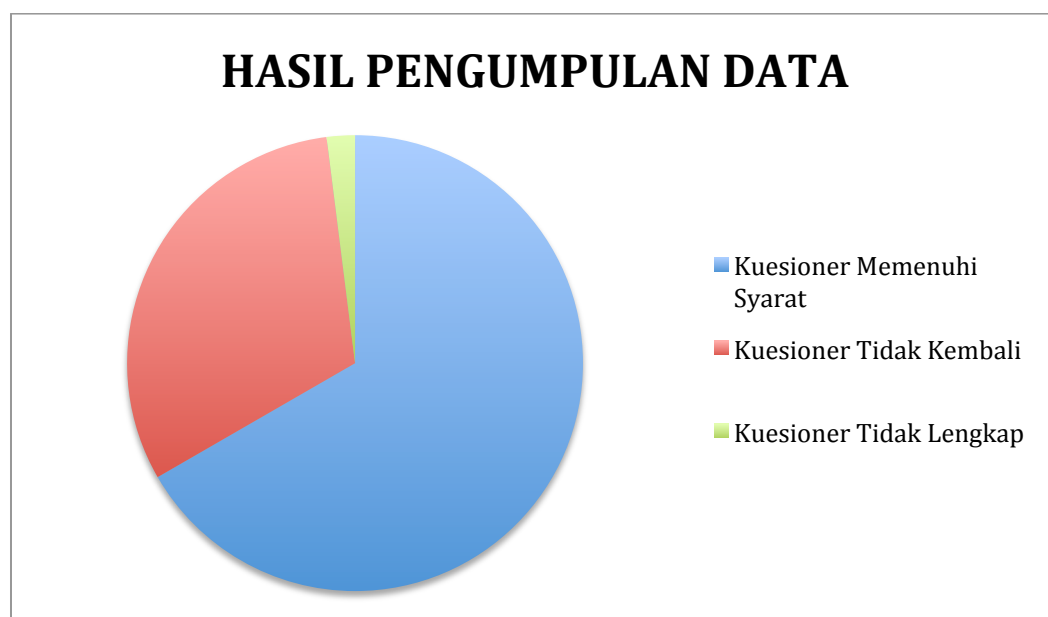
Bab ini membahas analisis data dan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Purworejo. Berdasar teori yang ada, penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab dua.

Hasil pengolahan data merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Analisis ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu bagian pertama, hasil pengumpulan data yang menjelaskan jumlah data yang siap dianalisis. Kedua, deskripsi responden yang menjadi target penelitian berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan. Ketiga, hasil pengujian data yang berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas. Keempat, pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan uji hipotesis.

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data seperti telah dijelaskan dalam bab tiga, menggunakan kuesioner. Dalam hal ini sebagai subyek responden adalah aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner yang berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

GRAFIK 4.1.



Sumber: data diolah

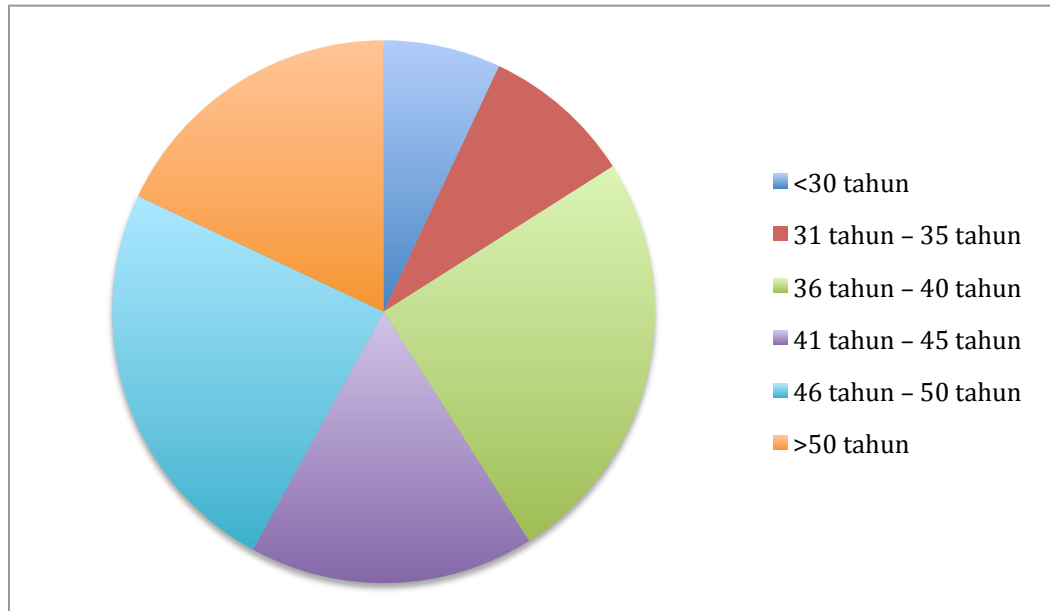
Jumlah kuesioner yang disebarkan ke responden sebanyak 150 (100%). Dari 150 kuesioner yang disebarkan tersebut, 103 (68.7%) diantaranya telah diisi oleh responden dan dikembalikan kepada peneliti, sedangkan sisanya sebanyak 47 (31.3%) tidak dikembalikan kepada peneliti. Dari 103 kuesioner yang

kembali, yang pengisiannya tidak lengkap sebanyak 3 (2%) sehingga kuesioner yang memenuhi syarat penelitian ini sebanyak 100 (66.7%).

4.2. Deskripsi Responden

4.2.1. Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, responden terdiri dari 6 kategori yaitu responden berusia kurang dari 30 tahun, 30 sampai 35 tahun, 36 sampai 40 tahun, 41 sampai 45 tahun, 46 sampai 50 tahun, dan diatas 50 tahun. Dari pengumpulan data yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut: responden yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 7 orang (7%), usia 31 sampai 35 tahun sebanyak 9 orang (9%), usia 36 sampai 40 tahun sebanyak 25 orang (25%), usia 41 sampai 45 tahun sebanyak 17 orang (17%), usia 46 sampai 50 tahun sebanyak 24 orang (24%), usia diatas 50 tahun sebanyak 18 orang (18%). Untuk responden yang paling banyak ditemui adalah responden berusia 36 sampai 40 tahun yaitu sebanyak 25 orang (25%).

GRAFIK 4.2.

Sumber: Data diolah

4.2.2 Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dari pengumpulan data yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut: responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 39 orang (39%) dan responden perempuan berjumlah 61 orang (61%).

GRAFIK 4.3.



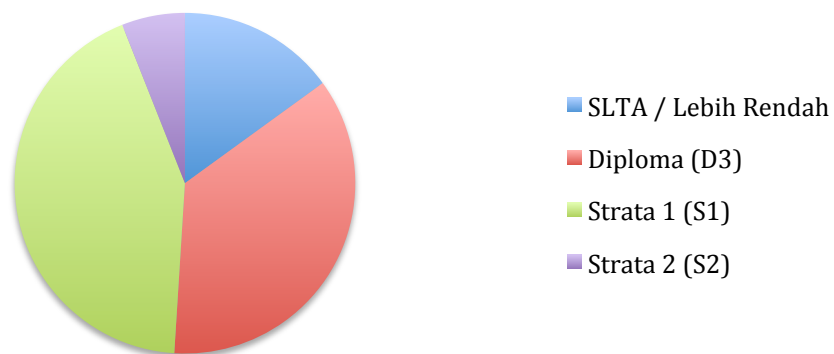
Sumber: Data diolah

4.2.3. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, responden terdiri atas 5 kategori yaitu SMA atau dibawahnya, Diploma (D3), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). Dari pengumpulan yang dilakukan, 15 orang (15%) memiliki jenjang pendidikan SLTA atau dibawahnya, 36 orang (36%) memiliki jenjang pendidikan Diploma (D3), 43 orang (43%) memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1), dan 6 orang (6%) memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2), sedangkan tidak ada atau 0 (0%) yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3). Untuk responden yang paling banyak ditemui adalah responden yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 43 orang (43%).

GRAFIK 4.4.

KLASIFIKASI RESPONDEN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN



Sumber: Data diolah

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1. Uji Validitas

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika *original sample estimate* pada *outer loading* berkorelasi lebih dari 0,50 (dengan signifikan 0,05 dan T statistic > 1,64), sedangkan untuk pengujian validitas dengan menggunakan *discriminant validity* adalah dengan menbandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

TABEL 4.1.
AVE DAN AKAR AVE

	Average variance extracted (AVE)	Akar (AVE)
SIK	0.692	0.832
KEB	0.926	0.962
KEM	0.838	0.915
KEG	0.733	0.856
PER	0.453	0.673
PEG	0.721	0.849
KIN	0.771	0.878

Sumber: Data diolah

Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model maka memiliki nilai *discriminant validity* yang baik (Jogiyanto, 2011). Dalam penelitian ini tidak terdapat item yang tidak valid, sehingga tidak ada indikator yang harus di drop dari penelitian yang telah dibangun.

TABEL 4.2.
CORRELATIONS OF THE LATENT VARIABLES

	SIK	KEB	KEM	KEG	PER	PEG	KIN
SIK	1.000						
KEB	-0.365	1.000					
KEM	0.016	-0.044	1.000				

KEG	0.581	-0.332	0.117	1.000			
PER	0.615	-0.361	-0.131	0.433	1.000		
PEG	0.618	-0.390	-0.091	0.555	0.585	1.000	
KIN	0.695	-0.451	-0.024	0.622	0.628	0.763	1.000

Sumber: Data diolah

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk Sikap Aparat Pemerintah Daerah (SIK) sebesar 0.832 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Sikap Aparat Pemerintah Daerah (SIK). Akar konstruk Kebingungan Aparat Pemerintah Daerah (KEB) sebesar 0.962 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Kebingungan Aparat Pemerintah Daerah (KEB). Akar AVE konstruk Kemudahan Penggunaan (KEM) sebesar 0.915 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Kemudahan Penggunaan (KEM). Akar konstruk Persepsi Kegunaan (KEG) sebesar 0.856 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Persepsi Kegunaan (KEG). Akar AVE konstruk Perilaku Organisasi (PER) sebesar 0.673 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Perilaku Organisasi (PER). Akar AVE konstruk Penggunaan Peraturan (PEG) sebesar 0.721 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Penggunaan Peraturan (PEG). Demikian halnya dengan akar AVE konstruk Kinerja Pekerjaan (KIN) sebesar 0.878 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk Kinerja Pekerjaan (KIN). Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua variable memiliki *discriminant validity* yang tinggi.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas pada data konstruk dapat menggunakan *composite reliability*. Konstruk memiliki reliabilitas yang baik jika *composite reliability*nya diatas 0.70. Berikut hasil perhitungan konstruk menggunakan PLS:

TABEL 4.3.
COMPOSITE RELIABILITY

	Composite Reliability
SIK	0.899
KEB	0.980
KEM	0.954
KEG	0.943
PER	0.901
PEG	0.911
KIN	0.953

Sumber: Data diolah

Hasil output *composite reliability* untuk masing-masing variable dinilai reliable karena seluruh variable diatas 0.70.

4.4. Menilai Inner Model atau Struktural Hasil Penelitian

Menilai inner model adalah untuk mengevaluasi hubungan konstruk laten atau variable yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang mempengaruhi implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Purworejo. Berikut adalah perhitungan inner model dari data yang diperoleh dengan menggunakan PLS:

TABEL 4.4.

RESULT FOR INNER WEIGHT

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
SIK -> PEG	0.272	0.271	0.090	3.025
KEB -> PEG	-0.119	-0.117	0.061	1.629
KEM -> PEG	-0.098	-0.095	0.089	1.112
KEG -> PEG	0.261	0.266	0.097	2.680
PER -> PEG	0.249	0.264	0.103	2.429
SIK -> KIN	0.215	0.217	0.090	2.402
KEB -> KIN	-0.103	-0.113	0.060	1.226
KEM -> KIN	0.004	0.004	0.057	0.074
KEG -> KIN	0.172	0.184	0.110	1.668
PER -> KIN	0.144	0.145	0.085	1.698
PEG -> KIN	0.411	0.394	0.076	5.426

Sumber: Data diolah

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 H1 :Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.411 menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat

penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 5.426, dengan menggunakan signifikansi 0.05 (T statistik > 1.64) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) yang merepresentasikan hubungan positif tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah terdukung. Hasil data tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Syafruddin (2009) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi aparat pemda dalam menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, semakin tinggi pula kinerja pekerjaan orang tersebut.

4.5.2. H2 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Sikap aparat pemerintah daerah memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.215 menunjukkan bahwa hubungan antara Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 2.402, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua (H2) yang merepresentasikan hubungan positif Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah terdukung. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.3. H3 : Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Sikap aparat pemerintah daerah memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.272 menunjukkan bahwa hubungan antara Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 3.025, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik}$

>1.64) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan dan optimisme aparat pemda dalam menggunakan dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil tersebut sekaligus mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.4. H4 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Kebingungan aparat pemerintah daerah memiliki nilai original sample estimate sebesar -0.103 menunjukkan bahwa hubungan antara Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah bernilai negatif, sedangkan untuk T statistik sebesar 1.226, dengan menggunakan signifikansi 0.05 (T statistik > 1.64) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis empat (H4) yang menyatakan bahwa Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan

Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh negatif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah tidak didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat (H4) yang mempresentasikan hubungan negatif Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah tidak terbukti. Hal ini dapat dikarenakan aparat pemerintah daerah mengetahui adanya kesulitan atau kebingungan dalam penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kesulitan tersebut tidak menghalangi penggunaan/penerapan aturan tersebut. Mengingat aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan wajib digunakan oleh seluruh aparat pemerintah daerah, sehingga kesulitan atau kebingungan yang ada didalamnya juga tidak akan mempengaruhi kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah. Hasil tersebut sekaligus mendukung penelitian Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.5. H5 : Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Kebingungan aparat pemerintah daerah memiliki nilai original sample estimate sebesar -0.119 menunjukkan bahwa hubungan antara Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai negatif,

sedangkan untuk T statistik sebesar 1.629, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis lima (H5) yang menyatakan bahwa Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh negatif pada penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan tidak didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima (H5) yang mempresentasikan hubungan negatif Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan tidak terbukti. Hal ini dapat dikarenakan aparat pemerintah daerah mengetahui adanya kesulitan atau kebingungan dalam penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kesulitan tersebut tidak menghalangi penggunaan/penerapan aturan tersebut. Mengingat aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan wajib digunakan oleh seluruh aparat pemerintah daerah, maka kesulitan atau kebingungan yang ada didalamnya juga tidak akan mempengaruhi penggunaan/penerapan aturan, sehingga kinerja pekerjaan pemerintah daerah juga tidak terpengaruh. Hasil tersebut sekaligus mendukung penelitian Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.6. H6 :Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan /penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Kemudahan penggunaan aturan memiliki nilai original sample estimate sebesar -0.098 menunjukkan bahwa hubungan antara kemudahan penggunaan aturan penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah bernilai negatif, sedangkan untuk T statistik sebesar 1.112, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis enam (H6) yang menyatakan bahwa Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan tidak didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis enam (H6) yang mempresentasikan hubungan positif Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terbukti. Hal ini dapat dikarenakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan wajib digunakan oleh seluruh aparat pemerintah daerah, sehingga kemudahan maupun kesulitan yang ada didalamnya tidak akan menambah atau mengurangi penggunaan/penerapan aturan. Hasil tersebut sekaligus mendukung penelitian Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.7. Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Kemudahan penggunaan aturan memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.004 menunjukkan bahwa hubungan antara kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 0.074, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis tujuh (H7) yang menyatakan bahwa Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah tidak didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis tujuh (H7) yang mempresentasikan hubungan positif Kemudahan penggunaan aturan terhadap kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah tidak terbukti. Hal ini dapat dikarenakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan wajib digunakan oleh seluruh aparat pemerintah daerah. Kemudahan maupun kesulitan yang ada didalamnya tidak akan mempengaruhi tingkat penggunaan aturan sehingga tidak berpengaruh pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah. Hasil tersebut sekaligus mendukung penelitian Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.8. Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan

Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.261 menunjukkan bahwa hubungan antara Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 2.680, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis delapan (H8) yang menyatakan bahwa Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh data yang ada.

Kegunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sesuatu tersebut maka orang ini akan merasa meningkatkan kebebasannya dalam berusaha atau bekerja. Sedang penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut (Davis (1989) dan Adams (1992) dalam Haryani (2009)). Dalam konteks aparat pemda dan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan atau berpengaruh secara positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa Kegunaan aturan Penyusunan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara positif berpengaruh terhadap peningkatan dan optimisme aparat pemda dalam menggunakan dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil tersebut sekaligus mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.9. Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.172 menunjukkan bahwa hubungan antara Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 1.668, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis sembilan (H9) yang menyatakan bahwa Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sembilan (H9) yang merepresentasikan hubungan positif Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah terdukung. Dalam hal ini dimungkinkan bahwa aparat pemda berpegang pada sikap positif bahwa aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang berguna dan dengan mudah diterapkan,

sehingga kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah meningkatkan sikap positif aparat pemda, dan dengan begitu kinerja pekerjaan mereka semakin meningkat. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Syafruddin (2009).

4.5.10. Perilaku organisasi berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Perilaku organisasi memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.144 menunjukkan bahwa hubungan antara Perilaku organisasi dengan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 1.698, dengan menggunakan signifikansi 0.05 ($T \text{ statistik} > 1.64$) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis sepuluh (H10) yang menyatakan bahwa Perilaku organisasi berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sepuluh (H10) yang merepresentasikan hubungan positif Perilaku organisasi dan kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah terdukung. Dalam hal ini dimungkinkan aparat pemerintah daerah Kab. Purworejo memiliki kejelasan tujuan dan usaha pelatihan yang baik sehingga berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan mereka. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela dan Rahmawati (2009).

4.5.11. Perilaku organisasi berpengaruh positif pada penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari data yang diolah didapatkan bahwa Perilaku organisasi memiliki nilai original sample estimate sebesar 0.249 menunjukkan bahwa hubungan antara Perilaku organisasi terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah bernilai positif, sedangkan untuk T statistik sebesar 2.429, dengan menggunakan signifikansi 0.05 (T statistik > 1.64) dan hasil perhitungan inner weights yang menunjukkan arah hubungan maka hipotesis sebelas (H11) yang menyatakan bahwa Perilaku organisasi berpengaruh positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh data yang ada.

Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebelas (H11) yang merepresentasikan hubungan positif Perilaku organisasi dan tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdukung. Dalam hal ini dimungkinkan aparat pemerintah daerah Kab. Purworejo memiliki kejelasan tujuan penerapan aturan dan usaha pelatihan yang baik terkait aturan tersebut sehingga berpengaruh terhadap tingkat penggunaan/penerapan aturan. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2008) dan Nurlaela dan Rahmawati (2009).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk menguji apakah faktor-faktor seperti (a) Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (b) tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (c) tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (d) sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (e) perilaku organisasi terhadap aturan Penyusunan Keuangan Daerah, mempengaruhi tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ;

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap aparat Pemerintah Daerah, Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perilaku organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja pekerjaan aparat Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Haryani dan Syafruddin (2009), Nurlaela dan Rahmawati (2009), dan Azhar (2008) yang menyimpulkan bahwa Sikap aparat Pemerintah Daerah, Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perilaku organisasi berpengaruh

positif secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006.

2. Faktor Kebingungan aparat Pemerintah Daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Kemudahan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Haryani dan Syafruddin (2009) yang menyimpulkan bahwa Kebingungan dan Kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan, tidak jujur, dan pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden serta peneliti yang tidak mengetahui apakah kuisioner benar-benar diisi oleh responden yang bersangkutan.
2. Dikarenakan terlalu banyak elemen dari Variabel Perilaku organisasi, maka elemen yang dipakai dalam penelitian ini hanya Tujuan organisasi dan Pelatihan organisasi.
3. Dikarenakan wilayah Kab. Purworejo yang cukup luas serta medan yang kurang memadai, Sampel dari penelitian ini hanya aparat pemerintah daerah Kab. Purworejo yang bertugas di Kantor Setda serta hanya

beberapa SKPD yang ada di sekitar lingkungan Setda sehingga tidak mencakup keseluruhan SKPD Kab. Purworejo.

4. Banyak dari aparat pemerintah daerah Kab. Purworejo yang menangani bagian keuangan bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi.

5.3. Saran

1. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, diusahakan dengan menggunakan observasi atau pengamatan langsung kepada objek, atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.
2. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah misalnya Faktor Motivasi, dan Dukungan Atasan.
3. Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, kiranya menerima pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan dan Komputer.

REFERENSI

- Azhar, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No.13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*, Thesis S2, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Graham, Helen. 2005. *Psikologi Humanistik Dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Sejarah*. Cetakan 1. Jakarta.
- Haryani dan Syafruddin, 2009, *Kepercayaan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Batang*, SNA XIII, Purwokerto.
- Haykal, M., 2007, *Analisis Peran dan Fungsi SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Kinerja* (Studi Kasus pada Pemkab Aceh Timur)
- Heri Hidayat, 2008, *Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD) Way Kanan Dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kab. Way Kanan*, Thesis S2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2011, *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Model Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*, Cetakan 1, UPP STIM Yogyakarta, Yogyakarta.
- Maryanti, H., A., 2002, *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Thesis S2, Nusa Tenggara Timur.
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. USA : University of Winconsin.
- Nurlaela dan Rahmawati, 2009, *Pengaruh faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukowonosraten*, SNA XIII, Purwokerto.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2010, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Edisi Revisi 14,

Rajawali Press, Jakarta.

Tuasikal, 2007, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol.08, No.01, Februari 2007.

Warisno, 2009, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*, Thesis S2, Universitas Sumatera Utara, Medan.

KUESIONER

Petunjuk

Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian. Pada tiap bagian berisi beberapa butir pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Bapak/Ibu diminta untuk memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak yang tersedia. Sedangkan untuk pertanyaan yang memiliki jawaban isian, Bapak/Ibu diharapkan menjawab pada tempat yang telah disediakan. Yakinkanlah bahwa Bapak/Ibu tidak menyilangkan lebih dari satu kotak, dan tidak terdapat pertanyaan yang belum dijawab/terlewatkan.

I. Pertanyaan Identitas

1. Nama : (boleh tidak diisi)

2. Jabatan :

3. Lama Menduduki Jabatan : tahun (Bulatkan dalam tahun)

4. Jenis Kelamin :

☐

Laki-laki

☐

Perempuan

5. Pendidikan Terakhir :

II. Daftar Pertanyaan Penelitian

Kami mohon beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tempat yang disediakan dengan skala berikut:

1	2	3	4	5	6
STS					SS

STS : Sangat Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

A. Persepsi Tentang Kegunaan

Menggunakan Permendagri no. 13 Tahun 2006 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Mempermudah penyusunan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik dan kinerja.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

2. Memungkinkan penyusunan dan penetapan anggaran yang lebih tepat waktu.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

3. Mempermudah koordinasi dalam penyusunan anggaran.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

4. Memungkinkan penyusunan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

5. Memungkinkan terdapatnya keselarasan antara anggaran dengan visi, misi, dan rencana pemerintah daerah.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

6. Memungkinkan penggunaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

B. Persepsi Tentang Kemudahan

1. Belajar memahami penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran merupakan hal yang mudah bagi saya.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

2. Saya tidak mendapat kesulitan memahami penggunaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit saya.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

3. Saya dapat dengan mudah menerapkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit saya.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

4. Saya merasa penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sulit saya lakukan dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran pada unit saya.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

C. Kebingungan Penggunaan Permendagri No. 13 Tahun 2006

1. Saya merasa bingung menerapkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit saya.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

2. Saya merasa cemas dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit saya, karena saya takut melakukan kesalahan dalam menerapkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

3. Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 membuat saya merasa tertekan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit saya.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

4. Saya ragu penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit saya tidak sesuai dengan yang dimaksudkan pada aturan tersebut.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

D. Penggunaan Permendagri No. 13 Tahun 2006

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran pada unit saya sepenuhnya telah mempedomani Permendagri No. 13 tahun 2006.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

2. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit anda, kira-kira sejauh mana anda telah mempedomani Permendagri no. 13 tahun 2006?

1	2	3	4	5	6
STS					SS

3. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran?

a. Belum Pernah b. 1 Tahun c. Lebih dari 1 Tahun

4. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran pada unit yang Bapak/Ibu pimpin, kira-kira berapa persen dari tugas yang Bapak/Ibu lakukan telah mempedomani Permendagri No. 13 Tahun 2006

- a. 0-20%
- b. 21-40%
- c. 41-60%
- d. 61-80%
- e. 81-100%

E. Sikap terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006

1. Permendagri No. 13 dan 26 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi saya dalam pelaksanaan tugas.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

2. Saya menyambut dengan baik terbitnya No. 13 Tahun 2006 karena aturan tersebut memuat secara jelas dan lengkap tata cara dan proses pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran menyediakan kesempatan bagi saya untuk dapat mengelola keuangan daerah secara efisien.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menimbulkan keletihan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan anggaran unit saya.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

F. Kinerja Pekerjaan atas Penggunaan Permendagri No. 13 Tahun 2006

1. Meningkatkan kinerja saya dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan visi, misi, dan rencana pemerintah daerah.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

2. Tugas penyusunan anggaran dapat saya lakukan dengan tepat waktu.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

3. Pengalokasian dan penggunaan anggaran yang saya lakukan menjadi lebih efektif dan efisien.

1	2	3	4	5	6
STS					SS

4. Kinerja saya dalam koordinasi dengan aparaturnya yang lain menjadi lebih baik.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

5. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah menjadi lebih efektif.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

6. Secara keseluruhan meningkatkan kinerja saya dalam bidang perencanaan dan pengawasan keuangan daerah.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

G. Perilaku Organisasi

1. Setiap ada penerapan aturan baru selalu diberikan pelatihan terlebih dahulu.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

2. Yang dikirim dalam pelatihan adalah mereka yang bekerja sesuai bidangnya.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

3. Jenis pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan pekerjaan.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

4. Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat bagus.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

5. Laporan Keuangan disusun oleh PPK-SKPD, laporan berupa LRA, Neraca, CALK.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

6. Paling lambat Laporan Realisasi Semester 1 diserahkan ke PPKD tidak lebih dari 10 hari setelah semester pertama tahun anggaran terakhir.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

7. Laporan Keuangan mendorong SKPD untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

8. Prosedur antara keuangan yang ada tidak bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta prosedur yang disusun Pejabat berwenang daerah/perda.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

9. Laporan Keuangan yang baik mencerminkan tatakelola pemerintahan yang baik.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

10. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran melalui laporan keuangan yang disusun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		

11. PPKD-SKPD dalam menyelenggarakan catatan akuntansi berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran.

1	2	3	4	5	6
STS			SS		